

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa dengan cakupan wilayah yang luas di Indonesia. Provinsi ini berdekatan dengan Jawa Timur pada bagian timur, sedangkan di sebelah barat berseberangan dengan Provinsi Jawa Barat. Wilayahnya memiliki luas sekitar 32.548 km², atau sekitar seperempat luas Pulau Jawa dan sekitar 1,7 persen dari total wilayah Indonesia. Secara astronomis, wilayah Jawa Tengah terletak pada 5°40'–8°30' LS dan 108°30'–111°30' BT.

Penggunaan lahan di Jawa Tengah terdiri dari dua kategori utama. Sekitar 992.000 hektar atau 30 persen wilayah provinsi ini digunakan sebagai lahan pertanian, khususnya persawahan. Sedangkan sebanyak kurang lebih 2.260.000 hektar atau 69 persen sisanya digunakan untuk lahan non-pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lahan sawah masih menjadi bagian penting, sebagian besar wilayah Jawa Tengah dialokasikan untuk keperluan non-agrikultur.

Wilayah administrasi Jawa Tengah meliputi enam kota dan dua puluh sembilan kabupaten, 573 kecamatan serta 7.809 desa. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi merupakan kawasan yang paling luas, sedangkan Kota Magelang mempunyai luas wilayah paling kecil dibandingkan kota lain di Jawa Tengah.



Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: yogyakarta.bkn.go.id, 2022

2.1.2 Kondisi Topografi

Topografi Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi. Di wilayah tengah provinsi ini terdapat dataran tinggi yang melintang memanjang, sementara dataran rendah tersebar di sekelilingnya. Provinsi ini juga memiliki garis pantai di sisi utara maupun selatan, dengan ciri geografis yang berbeda. Wilayah pesisir utara umumnya berupa dataran rendah yang relatif sempit, sedangkan di bagian selatan garis pantai berdekatan dengan jajaran Pegunungan Kapur Utara serta Pegunungan Kendeng. Hal ini membuat topografi lebih berbukit dan curam. Pada sisi selatan pantai juga terdapat dataran rendah dengan lebar sekitar 10 sampai 25 kilometer.

Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah sangat variatif, mulai dari sudut 0-2% yang merupakan bagian terbesar hingga lereng dengan sudut kemiringan lebih dari 40%. Topografi Jawa Tengah menunjukkan sebaran elevasi yang beragam. Wilayah pada ketinggian 0–100 meter mencakup 53,3% dari total area, sementara 27,4% lainnya berada pada ketinggian 100–500 meter. Daerah dengan

ketinggian 500–1.000 meter mencakup 14,7%, dan sekitar 4,6% berada pada elevasi melebihi 1.000 MDPAL.

2.1.3 Kondisi Demografi

Data kependudukan tahun 2025 dari Dukcapil Jawa Tengah menunjukkan bahwa populasi provinsi ini mencapai sekitar 38,2 juta jiwa dan terdiri dari kurang lebih 12,5 juta kepala keluarga. Sekitar 70% populasi, atau kurang lebih 26,7 juta jiwa, berada dalam kategori usia produktif 15–64 tahun. Kelompok usia non-produktif yakni anak-anak serta penduduk lanjut usia mencapai sekitar 11,5 juta jiwa atau 30% dari total populasi.

Distribusi jenis kelamin penduduk Jawa Tengah menunjukkan jumlah laki-laki sebanyak 17,1 juta jiwa (sekitar 44,7%) dan perempuan sebanyak 21,1 juta jiwa (sekitar 55,3%). Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Brebes tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 1,8 juta jiwa. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi, memiliki populasi lebih dari 1,7 juta jiwa, menjadikannya wilayah dengan penduduk terpadat di antara kota dan kabupaten lainnya.

2.2 Gambaran Umum Bapenda Provinsi Jawa Tengah

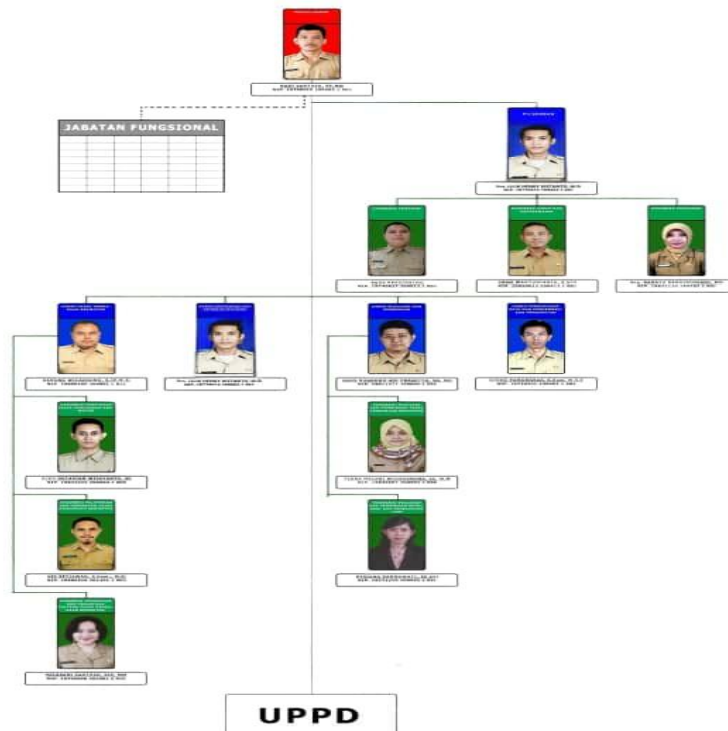
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang pendapatan. Lembaga ini memiliki fungsi utama menunjang Gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan terkait pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah. Visi BAPENDA Jateng

adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menopang pembangunan berkelanjutan.

Fungsi utama BAPENDA Jawa Tengah meliputi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, perumusan kebijakan teknis pendapatan, koordinasi dengan instansi lain, serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pengelolaan pajak daerah mencakup empat macam pajak utama, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Macam pajak tersebut, khususnya PKB dan BBNKB, berkontribusi penuh terhadap PAD Jawa Tengah, mencapai lebih dari 60% setiap tahun.

2.2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Jawa Tengah

BAPENDA Jawa Tengah terdiri dari sejumlah unit seperti Kepala Badan, Sekretariat, Unit yang menangani pajak daerah, Unit perencanaan dan pengendalian, Unit pengendalian dan evaluasi, serta Unit yang membawahi UPTD. Terdapat juga 35 Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah
 Sumber: Situs Resmi Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3 Gambaran Umum Aplikasi New Sakpole



Gambar 2. 3 Aplikasi New Sakpole
 Sumber: Google Play Store, 2025

Sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan, BAPENDA Jawa Tengah mengembangkan aplikasi New SAKPOLE. Aplikasi digital ini difungsikan untuk

meringankan masyarakat menyelesaikan tagihan PKB dengan cara yang efisien. Aplikasi tersebut pertama kali dipaparkan pada tahun 2017 dan mengalami pembaruan signifikan pada tahun 2020 dengan penambahan berbagai fitur baru yang lebih interaktif.

Fitur dalam aplikasi New SAKPOLE mencakup informasi PKB, simulasi denda, pembuatan kode pembayaran, serta opsi pelunasan pajak melalui berbagai kanal digital seperti mobile banking, mesin ATM, dan layanan marketplace. Bukti pembayaran yang sah berupa e-TBPKB dapat dipakai untuk pengesahan STNK di kantor SAMSAT maupun fasilitas cetak mandiri.

Pengembangan aplikasi ini dilandasi oleh kebutuhan efisiensi dan transparansi pelayanan pajak daerah beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Sistem manual dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan wajib pajak yang semakin besar, sehingga diperlukan sistem digital yang dapat dijangkau masyarakat secara fleksibel, kapan pun dibutuhkan.

Keberadaan New SAKPOLE membawa sejumlah manfaat, di antaranya mengurangi antrean di kantor SAMSAT, percepatan proses administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan dampak positif terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).. Data yang dirilis BAPENDA Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan jumlah transaksi melalui aplikasi ini setiap tahunnya, yang menandakan keberhasilan dalam mengubah pola pembayaran pajak masyarakat ke arah digital.

Kendala lain juga masih ditemui dalam implementasi, seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan, belum optimalnya integrasi data

kependudukan, serta adanya proses tertentu yang tetap memerlukan kehadiran fisik di kantor SAMSAT.

2.4 Gambaran Umum Pengguna Aplikasi New Sakpole

Pembagian wilayah Jawa Tengah mencakup 29 daerah kabupaten dan 6 wilayah kota dengan total populasi yang mencapai lebih dari 38 juta jiwa. Kondisi demografi dan geografis yang beragam tersebut membuat kebutuhan akan layanan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai agenda penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.. Aplikasi New Sakpole hadir sebagai inovasi digital dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan ini. New Sakpole bisa diakses secara legal melalui layanan unduhan Google Play Store, dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari satu juta hingga Juni 2025. Tingginya jumlah unduhan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital guna pemenuhan wajib PKB.

New Sakpole dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam Proses pelunasan PKB melalui sistem digital secara online, mengurangi antrian di Samsat, serta mempercepat proses administrasi. Meskipun aplikasi ini sudah mulai banyak digunakan, data realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui New Sakpole memperlihatkan kontribusi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan pembayaran langsung di Samsat. Apabila dibandingkan dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, penggunaan aplikasi New Sakpole masih berfokus pada daerah perkotaan dan wilayah dengan akses teknologi yang lebih baik. Berikut data pendapatan PKB melalui New Sakpole dan Samsat pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel 2. 1 Data Pendapatan PKB melalui New Sakpole dan Samsat			
Tahun	New Sakpole (Rp)	Samsat (Rp)	Persentase New Sakpole terhadap Samsat (%)
2021	62.927.695.000	4.693.057.067.600	1,34%
2022	53.435.659.825	5.380.145.648.825	0,99%

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan penurunan pendapatan dari New Sakpole sebesar 15% dari tahun 2021 ke 2022, sedangkan pendapatan dari Samsat meningkat sekitar 14,7%. Data tersebut juga memperlihatkan presentase penurunan New Sakpole terhadap Samsat. Penurunan kontribusi aplikasi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor misalnya keterbatasan sosialisasi, kendala kemampuan teknologi oleh masyarakat, dan preferensi pembayaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi aplikasi sangat besar, pemanfaatan New Sakpole belum menjangkau ke seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya pada kabupaten yang akses teknologi dan literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan dalam pengembangan fitur New Sakpole serta peningkatan edukasi dan sosialisasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat di 35 wilayah administratif Jawa Tengah agar penggunaan aplikasi ini dapat menjangkau seluruh kawasan dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.